

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
BANTARAGUNG KABUPATEN MAJALENGKA**

Nasywa Nur Hidayah, Satria Aji Imawan

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Community based tourism village development requires collaboration among multiple actors in management and decision-making processes. In practice, the involvement of government institutions, local communities, and supporting organizations often creates diverse patterns of cooperation shaped by the social context of each village. Bantaragung Tourism Village in Majalengka Regency represents one example of a tourism village that has developed through multi-actor involvement in managing village tourism activities. This study aims to understand the dynamics of Collaborative Governance in the development of Bantaragung Tourism Village by employing the Collaborative Governance model proposed by Ansell and Gash, which includes starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes as an analytical framework. This research applies a descriptive qualitative method, with data collected through in depth interviews and documentation. The findings indicate that collaboration among actors comprising the Village Government, Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Village Owned Enterprise (BUMDes), the Department of Tourism and Culture of Majalengka Regency, and the local community has been established through coordination, communication, and cooperative mechanisms in tourism village development. These interactions have gradually evolved through dialogue, role sharing, and community involvement in various tourism activities. Local leadership plays an important role in facilitating relationships among actors and maintaining collaborative continuity, although community participation in strategic decision making is still developing progressively. The study concludes that Collaborative Governance in the development of Bantaragung Tourism Village can be understood as a collaborative process formed through social interaction and shared experiences among actors, contributing to the sustainability of community-based tourism village management.

Keywords: *Collaborative Governance, Tourism Village Development, Tourism Village*

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menuntut adanya kolaborasi antar berbagai aktor dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah, komunitas lokal, serta lembaga pendukung seringkali membentuk dinamika kerja sama yang beragam sesuai dengan konteks sosial masing-masing desa. Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka merupakan salah satu desa wisata yang berkembang melalui keterlibatan multiaktor dalam pengelolaan kegiatan pariwisata desa. Penelitian ini bertujuan memahami dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung dengan menggunakan kerangka model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif sebagai alat analisis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor yang melibatkan Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, serta masyarakat telah terbentuk melalui mekanisme koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam pengembangan desa wisata. Interaksi tersebut berkembang secara bertahap melalui proses dialog, pembagian peran, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata. Kepemimpinan lokal berperan dalam memfasilitasi hubungan antar aktor dan menjaga keberlangsungan kolaborasi, meskipun partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis masih berkembang secara bertahap. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung dapat dipahami sebagai proses kolaboratif yang terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman kerja sama antar aktor, yang berkontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat.

Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Pengembangan Desa Wisata, Desa Wisata

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu fenomena sosial, ekonomi dan budaya yang melibatkan perpindahan sementara individu atau kelompok dari tempat tinggalnya menuju suatu destinasi dengan tujuan utama untuk rekreasi, relaksasi, eksplorasi maupun kepentingan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan wisata yang didukung oleh beragam layanan serta fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha yang mencerminkan transformasi kebutuhan manusia akan pengalaman interaksi sosial lintas budaya dan pencapaian nilai-nilai personal.

Sektor pariwisata memiliki peran yang luas dan terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan. Aktivitas di sektor tersebut memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu menggerakkan berbagai sektor turunan seperti perhotelan, UMKM, ekonomi kreatif dan infrastruktur serta menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Penguatan sektor pariwisata juga menjadi fokus kebijakan nasional melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola pembangunan daerah.

Perkembangan sektor pariwisata daerah

Kabupaten Majalengka menunjukkan dinamika peningkatan kunjungan wisatawan sebagai indikator berkembangnya sektor pariwisata daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki potensi strategis dalam pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Majalengka

Tahun	Wisatawan Manca Negara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2017	-	200.226	200.226
2018	-	23.260	23.260
2019	1.548	699.787	701.335
2021	-	472.906	472.906
2022	4	818.543	818.547
2023	19	1.050.505	1.050.542

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023.

Salah satu wilayah di Kabupaten Majalengka yang berkembang melalui pendekatan pariwisata berbasis masyarakat adalah Desa Wisata Bantaragung. Desa wisata ini memanfaatkan potensi alam, budaya, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kegiatan wisata sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Perkembangan aktivitas wisata di Desa Wisata Bantaragung menunjukkan dinamika kunjungan wisatawan yang berbeda pada setiap periode waktu. Variasi kunjungan tersebut menggambarkan kondisi perkembangan wisata desa yang masih mengalami fluktuasi kunjungan sepanjang tahun.

Tabel 2. Data Kunjungan Desa Wisata Bantaragung, Tahun 2024.

No.	Bulan	Banyaknya	Asal	Lama Tinggal	Keterangan
1.	Januari	55 orang	SMP Plus Islamic Village	5 Hari	Paket Edukasi
2.	Maret	3 orang	Increase	1 hari	FGD Climate Skill
3.	Juni	48 Orang	Universitas Pancasila	2 hari	Trip Observasi
		35 orang	BKSDA Kawah Kamojang	3 hari	Study Banding
4.	September	15 orang	Open Trip	1 hari	Paket Ulin di sawah
5.	Oktober	15 orang	Open Trip	1 hari	Paket Trekking
		30 orang	Bank BTN	1 Hari	Paket Trekking
		500 orang	BI, Dinas, Media, Dll.	1 Hari	Festival Bumi Bantaragung

Sumber : Laporan data kunjungan Desa Wisata Bantaragung, Tahun 2024.

Pengembangan desa wisata tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh strategi pengelolaan kegiatan wisata yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat. Salah satu strategi yang digunakan dalam menarik kunjungan wisatawan adalah melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis event wisata desa yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Tabel 3. Data Kunjungan Pasar Bumi Pakuwon

Tahun	Total Kunjungan	Rata-Rata/Event	Jumlah Daerah Asal	Keterangan
2024	3	2.365	788	Awal pelaksanaan event.
2025	11	12.129	1.103	Peningkatan signifikan & jangkauan luas.

Sumber : Pokdarwis Desa Bantaragung, 2025.

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menuntut adanya kolaborasi antar berbagai aktor dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah desa, kelompok sadar wisata, BUMDes, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai pelaku utama dalam

kegiatan pariwisata desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan potensi destinasi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kolaboratif antar aktor yang terlibat.

Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka merupakan salah satu desa wisata yang berkembang melalui keterlibatan multiaktor dalam pengelolaan kegiatan pariwisata desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan dan pengembangan desa wisata dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, serta interaksi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya dan aktivitas pemerintahan dalam rangka melaksanakan kebijakan publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik menggabungkan unsur ilmu dan praktik dalam mengelola urusan pemerintahan guna menyelesaikan persoalan publik melalui pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, serta keuangan negara secara efektif dan efisien (T. Keban, S.U.,

2019). Administrasi publik mencakup aktivitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pembangunan daerah, administrasi publik berperan sebagai instrumen dalam mengoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan secara kolektif. Peran tersebut menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan publik.

2. Manajemen Publik

Manajemen Publik merupakan penerapan fungsi manajemen dalam organisasi sektor publik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintahan. Manajemen publik menekankan efektivitas kinerja organisasi pemerintah melalui pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta pelaksanaan program publik secara sistematis (Pasolong, 2008). Perkembangan manajemen publik menunjukkan pergeseran dari pendekatan birokratis menuju pengelolaan publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada

pelayanan masyarakat.

Dalam praktiknya, manajemen publik menuntut adanya kemampuan koordinasi antaraktor serta pengelolaan kerja sama lintas sektor untuk menjawab kompleksitas permasalahan publik. Pengelolaan program pembangunan, termasuk pengembangan desa wisata, membutuhkan manajemen yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dan organisasi lokal agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan salah satu dimensi dari governance yang merujuk pada pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif dan berorientasi pada konsensus untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam tata kelola kolaboratif, setiap pemangku kepentingan tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi terlibat secara aktif melalui dialog terbuka yang memungkinkan penyampaian kepentingan, pembangunan pemahaman bersama, serta pencarian solusi yang dapat diterima seluruh pihak. *Collaborative Governance* berfokus pada penyelesaian

persoalan publik melalui keterlibatan berbagai aktor secara inklusif, transparan, dan partisipatif guna mewujudkan kesepahaman bersama dalam proses pengambilan keputusan publik (David E. Booher, 2002). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik yang tidak lagi dapat diselesaikan secara hierarkis dan sektoral, sehingga menuntut keterlibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam forum kolaboratif yang terstruktur, berorientasi pada konsensus, serta diarahkan pada pencapaian hasil bersama.

Model *Collaborative Governance* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Model (Ansell & Gash, 2008) yang memandang kolaborasi sebagai proses interaksi antaraktor dalam forum pengambilan keputusan kolektif. Model tersebut terdiri atas empat variabel utama, yaitu kondisi awal yang mencerminkan latar belakang sosial, ketimpangan sumber daya serta sejarah hubungan antaraktor sebelum kolaborasi berlangsung; desain kelembagaan yang berkaitan dengan struktur formal, aturan main, dan mekanisme partisipasi yang menjamin keadilan prosedural; kepemimpinan fasilitatif yang berperan mendorong partisipasi, menjembatani perbedaan kepentingan, serta menjaga iklim dialog yang konstruktif; serta proses kolaboratif yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pencapaian

pemahaman bersama antar pihak. Model ini bersifat prosesual dan menekankan dinamika interaksi sosial sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan serta efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan kebijakan dan program publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. Situs penelitian dilakukan di Desa Wisata Bantaragung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan desa wisata.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola Pokdarwis, BUMDes, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, masyarakat, serta pelaku usaha lokal. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Kredibilitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai

informan yang memiliki latar belakang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai fenomena penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bantaragung

Bagian hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui proses wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan Model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang menekankan pada empat elemen utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Pembahasan pada setiap elemen bertujuan untuk menggambarkan bagaimana aktor-aktor yang terlibat berinteraksi, membangun hubungan kerja sama, serta menghadapi berbagai dinamika dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan bentuk kolaborasi yang terjadi, tetapi juga menjelaskan proses terbentuknya kolaborasi secara bertahap dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Bantaragung. Pembahasan diawali dengan melihat kondisi awal yang menjadi dasar terbentuknya kolaborasi antaraktor

dalam pengembangan desa wisata.

1. Kondisi Awal

Kondisi awal kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung menunjukkan adanya kesadaran bersama antaraktor terhadap potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Pemerintah desa, Pokdarwis serta masyarakat memiliki kepentingan yang relatif sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Modal sosial berupa budaya gotong royong dan hubungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya menjadi faktor pendukung awal terbentuknya kolaborasi antaraktor.

Kondisi awal juga menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antaraktor, terutama dalam hal pemahaman pengelolaan pariwisata dan pengalaman kelembagaan. Sebagian masyarakat masih berada pada tahap adaptasi terhadap konsep desa wisata sehingga partisipasi belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk tidak dalam situasi yang sepenuhnya seimbang, melainkan melalui proses penyesuaian bertahap antaraktor yang memiliki sumber daya dan pengalaman berbeda.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi awal kolaborasi menjadi fondasi terbentuknya kerja sama antaraktor dalam pengembangan desa

wisata. Kesamaan tujuan dan modal sosial yang telah ada sebelumnya mendorong munculnya keterlibatan aktor lokal, meskipun masih diperlukan proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat secara lebih merata dalam kegiatan pengembangan wisata.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang melibatkan pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, serta dukungan dari pemerintah daerah. Keberadaan Pokdarwis menjadi aktor operasional utama dalam pelaksanaan kegiatan wisata, sementara pemerintah desa berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penguatan legitimasi kelembagaan. Aturan kerja dan pembagian peran antaraktor telah disepakati melalui mekanisme musyawarah desa dan koordinasi rutin.

Implementasi desain kelembagaan masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama terkait kejelasan pembagian tugas pada kegiatan tertentu dan konsistensi koordinasi antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan telah terbentuk secara formal, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi operasional agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

Keberadaan struktur kelembagaan

ini menunjukkan adanya upaya pengelolaan kolaborasi secara terorganisir dalam pengembangan desa wisata. Desain kelembagaan memberikan kerangka kerja bagi aktor untuk menjalankan peran masing-masing, namun efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada konsistensi koordinasi dan kejelasan pelaksanaan tugas dalam kegiatan operasional wisata.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung terlihat melalui peran pemerintah desa dan pengurus Pokdarwis dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Pemimpin berperan sebagai penghubung antaraktor, memediasi perbedaan pandangan, serta membuka ruang komunikasi dalam setiap kegiatan pengembangan wisata. Kepemimpinan tidak bersifat dominatif, melainkan lebih menekankan pada pendekatan partisipatif dan musyawarah.

Peran kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dalam upaya membangun motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wisata melalui pelatihan, diskusi, dan kegiatan bersama. Upaya tersebut menunjukkan adanya dorongan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antaraktor dalam pengembangan desa wisata.

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor penting dalam menjaga

keberlangsungan kolaborasi karena mampu membangun kepercayaan dan komitmen bersama antaraktor yang terlibat. Peran pemimpin sebagai fasilitator komunikasi dan koordinasi mendorong terciptanya suasana kolaboratif yang mendukung keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Bantaragung.

4. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung berlangsung melalui interaksi rutin antaraktor yang melibatkan dialog tatap muka, koordinasi kegiatan, serta pengambilan keputusan secara bersama. Komunikasi yang berlangsung secara informal maupun formal memungkinkan terbangunnya hubungan kerja yang lebih terbuka antaraktor. Kepercayaan antar pihak terbentuk secara bertahap melalui keterlibatan berulang dalam berbagai kegiatan wisata desa.

Meskipun proses kolaboratif telah berjalan, masih terdapat tantangan berupa tingkat partisipasi masyarakat yang belum konsisten serta ketergantungan terhadap aktor tertentu dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi berada pada tahap berkembang, di mana interaksi dan komitmen bersama terus mengalami penguatan seiring berjalannya kegiatan pengembangan desa wisata.

Proses kolaboratif yang berlangsung

juga menunjukkan adanya pembelajaran bersama antaraktor melalui keterlibatan berulang dalam kegiatan pengembangan wisata desa. Interaksi yang terus dilakukan melalui koordinasi dan kegiatan bersama mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing aktor dalam pengelolaan desa wisata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang melalui proses interaksi sosial yang berkelanjutan sehingga memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan komitmen bersama dalam mendukung keberlangsungan pengembangan Desa Wisata Bantaragung.

Pengembangan Desa Wisata Bantaragung memperlihatkan adanya interaksi dan keterlibatan berbagai aktor yang berlangsung melalui proses kolaborasi dalam pengelolaan wisata desa yang tidak hanya menunjukkan kerja sama dalam pelaksanaan program tetapi juga menggambarkan bagaimana proses kolaborasi terbentuk, dijalankan, dan dipertahankan dalam praktik pengelolaan desa wisata. Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan analisis ke dalam kerangka Model *Collaborative Governance* untuk melihat keterkaitan antar elemen kolaborasi berdasarkan temuan empiris di lapangan. Kondisi awal kolaborasi dilatarbelakangi kebutuhan bersama dalam mengembangkan potensi wisata desa serta adanya ketergantungan antaraktor yang memiliki perbedaan

sumber daya, kapasitas, dan kepentingan sehingga mendorong terbentuknya kerja sama antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata, masyarakat, dan pihak eksternal. Desain kelembagaan terlihat melalui keberadaan aturan formal maupun kesepakatan informal yang mengatur peran, mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta forum komunikasi sehingga kolaborasi berlangsung dalam kerangka yang relatif terstruktur. Keberlangsungan struktur tersebut diperkuat melalui kepemimpinan fasilitatif yang berfungsi memfasilitasi komunikasi, menjembatani kepentingan, serta menjaga keterlibatan para pihak melalui pendekatan partisipatif yang membangun kepercayaan dan stabilitas interaksi kolaboratif. Proses kolaboratif kemudian berlangsung melalui interaksi berkelanjutan seperti dialog antaraktor, musyawarah bersama, serta pengambilan keputusan bersama yang mendorong terbentuknya rasa saling percaya, pemahaman bersama, dan komitmen kolektif. Keterhubungan antar elemen menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung tidak hanya menjadi bentuk koordinasi antar lembaga, tetapi berkembang sebagai proses kolaborasi yang mendorong keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang tercermin dari konsistensi keterlibatan aktor, keberlangsungan kegiatan wisata, serta meningkatnya rasa kepemilikan bersama

terhadap pengembangan desa wisata.

KESIMPULAN

Collaborative Governance dalam menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor telah berjalan melalui keterlibatan pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata desa. Proses kolaborasi terbentuk melalui interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan serta didukung oleh adanya kesamaan tujuan dalam mengembangkan potensi desa wisata.

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung telah menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi antaraktor yang dilakukan melalui kegiatan musyawarah dan kerja sama dalam pelaksanaan program wisata. Kepercayaan antaraktor terbentuk melalui interaksi yang berulang serta didukung oleh modal sosial masyarakat seperti gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa wisata.

Namun pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait perbedaan kapasitas antaraktor serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kerja sama antaraktor agar

pengembangan desa wisata dapat berjalan secara optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung, beberapa saran diajukan sebagai upaya penguatan praktik kolaborasi yang telah berjalan agar dapat berkembang secara lebih berkelanjutan dan inklusif:

1. Pengelolaan desa wisata diharapkan dapat terus memperluas ruang komunikasi dan dialog antar aktor, khususnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya berada pada tahap pelaksanaan kegiatan tetapi juga dalam proses perumusan arah pengembangan desa wisata.
3. Pemerintah desa bersama Pokdarwis dan BUMDes dapat mendorong penyelarasan peran antar aktor melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja sama yang telah terbentuk secara informal.
4. Penyusunan pedoman kerja bersama dapat dipertimbangkan sebagai acuan bersama dalam pengelolaan desa wisata guna memperjelas pembagian peran dan menjaga konsistensi tata kelola kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- AAgus Dwiyanto. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 1–16.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- Athallah, A. R., Suliswanto, M. S. W., & Sari, N. P. (2024). Peran Sektor Parwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 4 (Thailand, Singapore, Malaysia, Dan Indonesia). *Jurnal Industri Pariwisata*, 7(1), 1–13.
<https://doi.org/10.36441/pariwisata.v7i1.2059>
- Clare A. Gunn, T. V. (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases* (4th ed.).
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003061656>
- David E. Booher, J. E. I. (2002). Network Power in Collaborative Planning.

Journal of Planning Education and Research, 21(3).

<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0739456X0202100301>

David Weaver & Laura Lawton. (2010). *Tourism Management* (4th ed.).

Dyah, S. W., & Prasajo, E. (2020). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Upaya Penanggulangan Pasca Gempa di Wilayah Jawa Bagian Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,

8(September), 1–19.

Edward P. Weber, Nicholas Lovrich, M. J.

Gaffney. (2005). Collaboration, Enforcement, and Endangered Species: A Framework for Assessing Collaborative Problem-Solving Capacity. *Society & Natural Resource*, 18(8), 677–698.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08941920591005034>